ANTARA/BAYU SAPUTRA

INSENTIF PPN DTP PERUMAHAN DIPERPANJANG HINGGA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan keterangan pers mengenai finalisasi paket kebijakan ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/9/2025). Menko Airlangga mengatakan bahwa pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP perumahan hingga 2026.

Pemerintah Siapkan Rp15,66T untuk Delapan Program Paket Ekonomi

Suahasil Nazara menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan serta mendesain alokasi anggaran untuk masing-masing program. Berdasarkan data yang dipaparkan, program magang lulusan perguruan tinggi menyasar 20 ribu orang dengan anggaran sebesar Rp198 miliar.

JAKARTA (LB) - Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15,66 triliun untuk delapan program paket ekonomi di semester II-2025. Dari total tersebut, sebanyak Rp12,79 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan non-APBN Rp2,87 triliun.

"Total APBN Rp12,79 triliun untuk paket ekonomi semester-II dan non-APBN terutama dari BPJS adalah Rp2,87 triliun. Ini kita jalankan, seluruh aturan kita siapkan," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (22/9).

Suahasil menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan serta mendesain alokasi anggaran untuk masing-masing program. Berdasarkan data yang dipaparkan, program magang lulusan perguruan tinggi menyasar 20 ribu orang dengan anggaran sebesar Rp198 miliar.

Lalu, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) menargetkan 552 ribu pekerja dengan estimasi anggaran sebesar Rp120 miliar. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 10 tahun 2025.

Program bantuan pangan menargetkan 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan estimasi anggaran sebesar Rp 7 triliun. Lalu, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta jaminan kematian (JKM) dengan diskon 50% untuk enam bulan. Estimasi anggaran sebesar Rp18,4 miliar yang ditanggung oleh BP Jamsostek.

Program manfaat layanan tambahan perumahan menyasar 1.050 unit dengan estimasi anggaran Rp 150 miliar yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program padat karya tunai (cash for work) dengan menargetkan 609.465 orang dengan alokasi anggaran Rp 3,6 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Rp 1,8 triliun untuk Kementerian Perhubungan.

Lalu, program percepatan deregulasi terkait rencana detail tata ruang (RDTR) digital dan integrasi ke sistem OSS dialokasikan anggaran Rp175 miliar. Terakhir, program perkotaan dengan peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gigs economy dengan estimasi anggaran Rp2,7 triliun.

"Kita sekarang sedang desain dan menyiapkan alokasi anggaran untuk program paket ekonomi, seperti program magang, perluasan PPh 21 DTP, bantuan pangan, bantuan iuran JKK, JKM," terang Suahasil. ● **hen**

Pertamina Perluas Distribusi BBM di Seluruh Indonesia

JAKARTA (LB) - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Hingga 2025, titik distribusi BBM telah mencapai 15.345 titik dan pangkalan LPG sebanyak 269.096 titik di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

"Pertamina akan tetap menjaga akses energi (accessibility), harga yang terjangkau (affordability) dan produk energi yang dibutuhkan (acceptability), bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan tertulis, Senin (22/9).

Fadjar menjelaskan, dalam mendistribusikan energi Pertamina tidak hanya berada pada area perkotaan, namun harus menjangkau titik-titik tersulit seperti wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dengan berbagai moda transportasi, baik darat, laut dan udara.

Pada wilayah 3T ini, Fadjar menambahkan, sejak tahun 2017 - 2024, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading telah mengoperasikan 573 lembaga penyalur BBM Satu Harga.

Ia mengatakan BBM Satu Harga ini untuk memastikan masyarakat di wilayah 3T mendapat harga BBM yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya, sehingga mewujudkan sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dijelaskan Fadjar, BBM Satu Harga saat ini tersebar di Sumatera sebanyak 86 titik, Kalimantan 112 titik, Sulawesi 60 titik, Nusa Tenggara 102 titik, Maluku 87 titik dan Papua 121 titik, serta Jawa dan Bali sebanyak 5 titik.

"Program BBM Satu Harga memberikan dampak positif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah 3T, dengan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM," imbuh Fadjar.

Selain itu, Pertamina juga terus mendorong pengembangan Pertashop sebagai titik distribusi energi yang lebih luas, termasuk produk non-subsidi seperti Pertamax 92 dan Bright Gas, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan pemerataan distribusi energi.

Dalam penyaluran LPG Subsidi, Pertamina juga menjalankan program One Village One Outlet (OVOO), yang kini telah menjangkau 70.448 Desa/Kelurahan atau 98% wilayah Indonesia. Keberadaan Pangkalan LPG tersebut telah memudahkan masyarakat hingga wilayah pelosok dalam memperoleh LPG.

Melalui program tersebut, tambah Fadjar, Pertamina hadir dan melayani masyarakat hingga pelosok. Jalur geografis Indonesia menjadi tantangan bagi penyaluran energi, namun Pertamina berupaya menjaga pasokan energi.

"Upaya distribusi energi bagi Pertamina tak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, juga untuk menggerakkan industri-industri, sehingga ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik," tuturnya. ● **pan**

Pemerintah Perpanjang Insentif PPN DTP Perumahan hingga 2026

JAKARTA (LB) - Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk sektor properti hingga 2026.

Dalam skema ini, pemerintah menanggung sepenuhnya PPN atas pembelian rumah atau properti baru siap huni dengan harga jual maksimal Rp2 miliar.

Sementara untuk properti seharga Rp2 miliar-Rp5 miliar, pembebasan PPN hanya berlaku pada bagian harga pertama Rp2 miliar, sedangkan sisanya tetap dikenakan tarif normal.

"PPN DTP properti tadi disetujui oleh Kementerian Perumahan dan Pak Menteri Keuangan. PPN ditanggung pemerintah ini diberlakukan 2026, juga ini lanjutan jadi PPN DTP sampai dengan Rp2 miliar itu diberlakukan sampai tahun depan, 2026," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9).

Perpanjangan insentif PPN DTP merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi lanjutan yang disiapkan pemerintah untuk 2025-2026. "Ditambah lagi PPN DTP tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian rumah sampai Rp5 miliar, maka Rp2 miliarnya ditanggung pemerintah, sisanya ditanggung oleh pembeli," ujar Airlangga.

Adapun insentif PPN DTP perumahan seharusnya berakhir pada akhir 2025 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/2025. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, fasilitas tersebut tetap berlaku hingga 2026.

Fasilitas PPN DTP diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Setiap orang hanya dapat memanfaatkannya untuk satu unit hunian. Insentif ini tidak berlaku apabila pembelian dilakukan untuk lebih dari satu unit, pembayaran uang muka dilakukan sebelum kebijakan berlaku, atau unit dijual kembali dalam waktu kurang dari satu tahun. ● **dot**

RI dan Turki Terus Perkuat Kerja Sama Industri Strategis

JAKARTA (LB) - Indonesia dan Turki menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama yang komprehensif di sektor industri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Perindustrian dan Teknologi Turki, Mehmet Fatih Kacir.

"Indonesia akan segera menyusun roadmap kerja sama industri Indonesia–Turki sebagai panduan strategis untuk memperkuat kolaborasi jangka panjang di berbagai sektor," kata Agus dalam keterangan resminya, dikutip dari laman Kemenperin, Senin (22/9).

Pertemuan keduanya dilaksanakan di sela keikutsertaan Menperin Agus pada 12th Annual Teknofest Aerospace and Technology Festival di Bandara Internasional Ataturk, Istanbul, Sabtu (20/9) waktu setempat. Festival teknologi kedirgantaraan terbesar di Turki ini dihadiri jutaan pengunjung dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, hingga akademisi.

"Pertemuan ini sekaligus menindaklanjuti rangkaian interaksi intensif antara Indonesia dan Turki dalam dua tahun terakhir. Sejak kunjungan kami ke Turki pada Juni 2024, sejumlah perusahaan besar seperti Sanko Holding, Arcelik (KOC Holding), dan Kordsa (Sabanci Holding) menunjukkan minat besar untuk berinvestasi di Indonesia," tutur Agus.

Sebagai informasi, Sanko Holding telah memulai investasi budi daya tuna di Biak, Papua. Agus berharap Sanko memperluas ke sektor hilirisasi, termasuk pengolahan tuna dan industri pendukung seperti galangan kapal, bahkan terbuka peluang investasi pada proyek energi terbarukan di bidang PLTA.

Sementara itu, Kordsa yang telah beroperasi di Bogor dengan memproduksi bahan baku ban, tengah mengembangkan riset material komposit dan produk bernilai tambah tinggi untuk ekspor.

Perusahaan ini telah membangun fasilitas penelitian dan pengembangan pada tahun 2023 dan akan mengembangkan produk komposit, airbag, dan penguat struktur bangunan dengan tujuan ekspor. Menperin mengusulkan agar perusahan ini mengajukan insentif fiskal berupa super tax deduction untuk litbang.

Adapun Arcelik, produsen peralatan rumah tangga terbesar kedua di dunia, telah bekerja sama dengan mitra lokal untuk memproduksi mesin cuci di Indonesia dan berencana memperluas produksi lemari es serta pendingin udara. Perusahaan ini bahkan menargetkan Indonesia sebagai basis produksi baru di Asia, sejajar dengan fasilitasnya di Thailand.

"Momentum kerja sama Indonesia dan Turki juga diperkuat melalui pertemuan High-Level Strategic Cooperation Council (HLSC) pada Februari 2025, ketika Presiden RI dan Presiden Turki menandatangani Joint Statement memperingati 75 tahun hubungan diplomatik," ungkap Agus.

Pertemuan tersebut menghasilkan 12 nota kesepahaman antar-pemerintah di berbagai sektor, termasuk industri pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan tinggi, perdagangan, hingga perindustrian. Khusus di bidang industri, kedua negara telah menyepakati pembentukan Joint Committee for Industrial Cooperation yang mencakup 14 sektor strategis, mulai dari teknologi baterai, kendaraan listrik, tekstil, hingga industri halal.

"Selain itu, terdapat 10 kesepakatan antarperusahaan, seperti kerja sama antara Pertamina Hulu Energi dan TPAO di sektor migas, kerja sama PT PAL Indonesia dengan TAIS Shipyard untuk pembangunan frigat kelas Istanbul, hingga joint venture antara perusahaan Indonesia dengan Baykar dan Roketsan untuk pendirian fasilitas produksi drone tempur," imbuhnya. ● **dro**

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. TRIPUTRA WILSOR PROPERTINDO** berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 16 September 2025 para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yaitu menyetujui penurunan modal dasar dari Rp 250.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 200.000.000.000,- dan menyetujui Penurunan modal ditempatkan dan modal disetor dalam perseroan dari sebesar Rp 120.0000.000.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 85.0000.000.000,- Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada **PT. TRIPUTRA WILSOR PROPERTINDO**.

Jakarta, 23 September 2025
PT. TRIPUTRA WILSOR PROPERTINDO
ttd
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. TRIPUTRA UTAMA PROPERTINDO** berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 16 September 2025 para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yaitu menyetujui penurunan modal dasar dari sebesar Rp 160.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 60.000.000.000,- dan menyetujui Penurunan modal ditempatkan dan modal disetor dalam perseroan dari sebesar Rp 42.630.000.000,- menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 21.315.000.000,- Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada **PT. TRIPUTRA UTAMA PROPERTINDO**

Jakarta, 23 September 2025
PT. TRIPUTRA UTAMA PROPERTINDO
ttd
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. ZAMAN BANGUNPERWITA** berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") tertanggal 16 September 2025 para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan yaitu menyetujui penurunan modal dasar dari Rp 500.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- dan menyetujui Penurunan modal ditempatkan dan modal disetor dalam perseroan dari sebesar Rp 149.000.000.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 89.000.000.000,- Kepada pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada **PT. ZAMAN BANGUNPERWITA.**

Jakarta, 23 September 2025
PT. ZAMAN BANGUNPERWITA
ttd
Direksi Perseroan

PERBAIKAN NERACA SEMENTARA LIKUIDASI
PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (DALAM LIKUIDASI)

(dalam Rupiah penuh)

AKUN	Ref	SAK	Nilai Likuidasi			Penjelasan	
			Dana Asuransi	Dana Perusahaan	PAYDI	Bermasalah	Tidak Bermasalah
ASET							
Investasi							
Deposito Wajib	1	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	20.000.000.000
Deposito Berjangka	1	23.073.931.853	23.073.931.853	-	-	11.581.493.633	11.492.438.220
Saham di Bursa Efek	2	2.457.161.600	2.457.161.600	-	-	1.064.276.720	1.392.884.880
Obligasi	3	3.652.184.000	3.652.184.000	-	-	2.852.184.000	800.000.000
Reksadana	4	5.645.228.185	5.645.228.185	-	-	-	5.645.228.185
Saham Penyertaan	5	138.000.000	138.000.000	-	-	-	138.000.000
Jumlah Aset Investasi		**54.966.505.638**	**54.966.505.638**	**-**	**-**	**15.497.954.353**	**39.468.551.285**
Bukan Investasi							
Kas dan Bank	6	5.998.740.847	5.998.740.847	-	-	431.306.234	5.567.434.613
Tagihan Klaim Reasuransi	7	252.082.945.132	252.082.945.132	-	-	232.250.246.084	19.832.699.048
Aset Reasuransi	8	1.091.234.187.909	1.091.234.187.909	-	-	1.091.234.187.909	-
Tagihan Hasil Investasi	9	62.828.327	62.828.327	-	-	62.828.327	-
Aset Tetap Lain	10	4.158.398.298	-	4.158.398.298	-	394.921.554	3.763.476.744
Pajak Dibayar Dimuka	11	2.269.901.062	2.269.901.062	-		2.269.901.062	-
Aset Lain	12	165.401.969.532	-	165.401.969.532	-	165.401.969.532	-
Jumlah Aset Bukan Investasi		**1.521.208.971.107**	**1.351.648.603.277**	**169.560.367.830**	**-**	**1.492.045.360.702**	**29.163.610.405**
JUMLAH ASET - BERSIH		**1.576.175.476.745**	**1.406.615.108.915**	**169.560.367.830**	**-**	**1.507.543.315.055**	**68.632.161.690**
LIABILITAS/KEWAJIBAN							
Estimasi Biaya Likuidasi	13	-	-	39.600.763.400		-	39.600.763.400
Estimasi Utang Pajak	14	2.084.407.016	-	14.009.782.257		-	14.009.782.257
Kewajiban/ Liabilitas Kepada Pemegang Polis							
Utang Klaim	15	105.361.111.253	105.361.111.253	-	-	31.256.311.537	74.104.799.716
Cadangan Klaim	16	1.432.903.082.276	1.432.903.082.276	-	-	131.006.953.022	1.301.896.129.254
Cadangan Premi		763.974.549.601	763.974.549.601	-	-	763.974.549.601	-
Cadangan Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		23.206.389.479	23.206.389.479	-	-	23.206.389.479	-
Utang Reasuransi	19	126.716.970.786	126.716.970.786	-	-	126.361.819.255	355.151.531
Refund Premi	20	138.615.009.840	138.615.009.840	-	-	30.836.223.263	107.778.786.577
Jumlah Liabilitas Kepada Pemegang Polis		**2.590.777.113.235**	**2.590.777.113.235**	**-**	**-**	**1.106.642.246.158**	**1.484.134.867.077**
Kewajiban Lain							
Pinjaman Subordinasi	21	15.500.000.000	-	15.500.000.000	-	15.500.000.000	-
Kewajiban Kepada Kreditur lainnya	22	3.660.577.555	-	-		-	18.669.359.460
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		4.457.041.187	-	4.457.041.187	-	4.457.041.187	-
Utang Lain	24	33.606.614.082	33.606.614.082	-	-	25.470.590.543	57.486.801.513
Jumlah Kewajiban Lain		**57.224.232.824**	**33.606.614.082**	**19.957.041.187**	**-**	**45.427.631.730**	**76.156.160.973**
JUMLAH KEWAJIBAN / LIABILITAS		**2.650.085.753.075**	**2.624.383.727.317**	**73.567.586.844**	**-**	**1.152.069.877.888**	**1.613.901.573.707**
ESTIMASI SELISIH LEBIH / KURANG		**(1.073.910.276.330)**	**(1.217.768.618.402)**	**95.992.780.986**	**-**	**355.473.437.167**	**(1.545.269.412.017)**

Jakarta, 23 September 2025
Tim Likuidasi PT Asuransi Purna Artanugraha (Dalam Likuidasi)

Ttd,	Ttd,	Ttd,
Even Denny Fransisca	**Ryanto Piter**	**I. Heru Dripatmanto**
Ketua Tim Likuidasi	Anggota Tim Likuidasi	Anggota Tim Likuidasi

Kunjungi website www.aspan.co.id untuk mengakses:
1. Perbaikan Daftar Nominatif Kreditor per tanggal 23 September 2025.
2. Tata Cara Penyelesaian dan Pembagian Hasil Kekayaan Likuidasi PT Asuransi Purna Artanugraha (Dalam Likuidasi).

PENGUMUMAN

Berdasarkan akta tanggal 17 September 2025 nomor 04 dibuat dihadapan Yufita Sudjinto, BASc, SH, Mkn, Perseroan Terbatas **PT. INTRA BANGUN NUSANTARA**, berkedudukan di Jakarta Utara, ("Perseroan"), telah memutuskan dan menyetujui antara lain:
1. Membubarkan Perseroan terhitung tanggal 20 Agustus 2025
2. Menunjuk **NOMELINO VALENCIA** sebagai **Likuidator Perseroan**

Bagi pihak yang berkepentingan yang memiliki tagihan terhadap Perseroan, dapat menghubungi likuidator dalam jangka waktu 60 hari terhitung tanggal pengumuman ini disertai dokumen asli dan lengkap ke :
Jl. Griya Agung Komplek Griya Sentosa No.12, Sunter Agung, Tanjung Priok

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan 149 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 September 2025
NOMELINO VALENCIA
Likuidator

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN

PT BUMIHARITA PERSADAJAYA TAMBANG ("**PT BHPJT**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, bermaksud untuk mengambil alih saham-saham baru yang diterbitkan oleh PT ASG HARITA MINING SERVICES ("**Perseroan**") melalui peningkatan modal ditempatkan dan/atau disetor Perseroan sebanyak 17.970 lembar saham, hal mana akan mengakibatkan beralihnya pengendali dalam Perseroan.

Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman ini, kreditur dapat menyampaikan keberatan atas pengambilalihan ini dengan disertai alasan-alasan dan bukti pendukung ke alamat Perseroan di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C Lt. 8, Jl. TB Simatupang Kav. 88, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 23 September 2025
PT BUMIHARITA PERSADAJAYA TAMBANG
Direksi
PT ASG HARITA MINING SERVICES
Direksi

PENGUMUMAN
HASIL AKHIR LIKUIDASI PT UDA DIGITAL MANDIRI (DALAM LIKUIDASI)

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan berdasarkan akta Nomor 03, tanggal 18 September 2025, dibuat dihadapan VARINIA, SH., Notaris di Jakarta, Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan :
1. Menyetujui dan mengesahkan hasil akhir likuidasi dimuat dalam sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban Likuidator yang telah disiapkan oleh Likuidator tertanggal 08 November 2024
2. Menerima dan mengesahkan setiap dan segala tindakan yang telah dilakukan oleh JOSEPH ERWIN selaku Likuidator sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan dan oleh karena itu untuk memberikan pelunasan dan pembebasan secara penuh (acquit et decharge) kepada Likuidator.

Maka proses akhir pembubaran dan likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan dan dengan demikian seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab Likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan telah berakhir.

Jakarta, 23 September 2025
Likuidator